



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PETA RISIKO

2026

@disbudparsumsel
www.southsumateratourism.com



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	
Tahun Penilaian	:	2026	
Periode yang dinilai	:	2026	
Urusan Pemerintahan	:	Kebudayaan dan Pariwisata	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	
Sumber Data	:	Renstra Disbudpar Prov. Sumsel Tahun 2025-2029	
Tujuan Strategis	:	Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Sasaran Strategis	:	1. Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
IKU Renstra OPD		IKU	2026
	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,81
	2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan Minum	2.1
	4	Jumlah Wisatawan Mancanegara	2.209
	5	Jumlah Wisatawan Nusantara	20.002.788
	6	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	3,060,300,000
	7	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	81,20
Program		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengembangan Kebudayaan 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Program Pengelolaan Permuseuman 6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 7. Program Pemasaran Pariwisata 8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual 9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko		Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Sasaran Strategis :	
		1. Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		2. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
		IKU :	
		I Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	
		II Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	
		III Indeks Pembangunan Kebudayaan	
		IV Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Program :	
		1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
		2 Program Pengembangan Kebudayaan	
		3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
		Palembang, Januari 2026	
		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan,  Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 197204021997031008	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: 2026
Urusan Pemerintahan	: Kebudayaan dan Pariwisata
OPD yang Dinilai	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
Sumber Data	RENJA Tahun 2026
Tujuan Strategis	Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Renja 2026) dan Kegiatan Utama	1 Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2 Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Keluaran/Hasil Kegiatan	1 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 9 Dokumen 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri - Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 10 Kegiatan 3 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan 10 OPK
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : 1 Program Pemasaran Pariwisata 2 Program Pengembangan Kebudayaan 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 1 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2 Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : 1 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri - Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 13 Laporan 2 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 3 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan 10 OPK 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 18 unit 5 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Pembelian Standing AC untuk TBS) 2 unit
	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 197204021997031008

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Fraud Strategi Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
 Nama OPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : 2026
 Urusan Pemerintahan : Kebudayaan dan Pariwisata

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan : Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
	Sasaran 1 : Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara								
		2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara								
		3. Indeks Pembangunan Kebudayaan								
	Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	4. Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
1	Program Pemasaran Pariwisata	1. Terpromosikannya pariwisata Sumsel di dalam dan luar negeri	1. Manipulasi data kunjungan wisatawan	RKS.001	Dinas	Kurangnya pengawasan terhadap data, lemahnya sistem informasi	Internal	C	Data tidak akurat, pengambilan keputusan tidak tepat	Industri Pariwisata yang terkena dampak Perhotelan dan Penginapan, Rumah Makan dan Restoran, Biro Perjalanan, Masyarakat Umum
2	Program Pengembangan Kebudayaan	2. Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan	2. Pemalsuan data OPK	RKS.002	Dinas	Kurangnya pengawasan dan verifikasi data, lemahnya sistem informasi	Eksternal	C	Data OPK tidak akurat, alokasi anggaran tidak tepat sasaran	Pemerintah daerah, masyarakat umum dan pelaku kebudayaan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3. Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3. Penggunaan anggaran tidak efisien	RKS.003	Dinas	Perencanaan yang kurang matang, lemahnya pengawasan	Eksternal	C	Pemborosan anggaran, program tidak berjalan optimal	Pemerintah daerah, masyarakat umum dan pelaku kebudayaan

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan,

Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197204021997031008

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Fraud Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama OPD	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun 2025-2029)
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Urusan Pemerintahan	: Kebudayaan dan Pariwisata

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
	Sasaran Strategis OPD 1: Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Promosi tidak efektif	RKS.001.0 1	Dinas	Strategi promosi kurang tepat sasaran, kurangnya inovasi dalam promosi	Eksternal	C	Kunjungan wisatawan tidak meningkat, target tidak tercapai	Industri Pariwisata yang terkena dampak Perhotelan dan Penginapan, Rumah Makan dan Restoran, Biro Perjalanan, Masyarakat Umum
	Program: Program Pemasaran Pariwisata		Pemasaran pariwisata tidak optimal	RKS.001.0 2	Dinas	Kurangnya anggaran pemasaran, kurangnya kerjasama dengan pihak terkait	Internal	C	Pendapatan daerah dari sektor pariwisata tidak meningkat, potensi pendapatan tidak tergalai secara maksimal	Industri Pariwisata yang terkena dampak Perhotelan dan Penginapan, Rumah Makan dan Restoran, Biro Perjalanan, Masyarakat Umum
			Pelatihan dan pengembangan SDM tidak efektif	RKS.001.0 3	Dinas	Kurikulum pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata, kurangnya fasilitas pelatihan yang memadai	Eksternal	C	Kualitas SDM di bidang pariwisata rendah, daya saing pariwisata daerah menurun	Industri Pariwisata yang terkena dampak Perhotelan dan Penginapan, Rumah Makan dan Restoran, Biro Perjalanan, Masyarakat Umum
	Program: Program Pengembangan Kebudayaan	1. Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan	Data warisan budaya tidak akurat	RKS.002.0 1	Dinas	Kurangnya sistem pendataan yang baik, kurangnya tenaga ahli di bidang dokumentasi	Internal	C	Data warisan budaya tidak lengkap, sulit untuk dilestarikan, potensi wisata hilang	Pemerintah daerah, masyarakat umum dan pelaku kebudayaan
			Kualitas SDM di bidang kebudayaan rendah	RKS.002.0 2	Dinas	Kurikulum pendidikan dan pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan industri budaya, kurangnya fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai	Eksternal	C	Kualitas SDM di bidang kebudayaan rendah, daya saing industri budaya menurun	Pemerintah daerah, masyarakat umum dan pelaku kebudayaan

Sasaran Strategis OPD 2: Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran tidak terserap secara optimal	RKS.003.0 1	Dinas	Perencanaan anggaran yang kurang matang, kurangnya koordinasi antar unit kerja	Internal	C	Program tidak berjalan sesuai rencana, target kinerja tidak tercapai	Pemerintah daerah, masyarakat umum dan pelaku kebudayaan
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan keuangan tidak akurat atau tidak tepat waktu	RKS.003.0 2	Dinas	Lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pemahaman tentang peraturan keuangan	Internal	C	Opini laporan keuangan tidak WTP, kerugian keuangan daerah	Pemerintah daerah, masyarakat umum dan pelaku kebudayaan

Palembang, Januari 2026
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Fraud Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nama OPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Penilaian : 2026 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2025-2029) Tujuan Strategis : Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sasaran strategis OPD : Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Risiko			Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Takap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program : Program Pemasaran Pariwisata										
	Kegiatan: Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - <i>Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2026</i>	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumsel	Pengelolaan Keuangan	Penggelapan dana kegiatan	RKF.001	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemisahan tugas	Eksternal	C	Kerugian keuangan panitia, kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana	Semua orang yang terlibat
			Evaluasi Kegiatan	Manipulasi data laporan	RKF.002	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tekanan untuk mencapai target, kurangnya integritas	Eksternal	C	Laporan tidak akurat, evaluasi tidak objektif	Semua orang yang terlibat
	Kegiatan: Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - <i>Festival Sriwijaya 2026</i>	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumsel	Perencanaan	Pengelembungan anggaran	RKF.003	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kurangnya transparansi dalam penyusunan anggaran, kurangnya pengawasan	Eksternal	C	Kerugian keuangan daerah, alokasi anggaran tidak efisien	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengadaan Barang/Jasa	Pengelembungan harga	RKF.004	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, kolusi antara panitia dan vendor	Eksternal	C	Kerugian keuangan panitia, kualitas barang/jasa tidak sesuai	Semua orang yang terlibat
	Program : Program Pengembangan Kebudayaan										
	Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - <i>Pekan Kebudayaan Daerah</i>	Jumlah Peserta yang mengikuti	Pelaksanaan Kegiatan	Pungutan liar	RKF.005	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kurangnya pengawasan di lapangan, lemahnya penegakan hukum	Internal	C	Pendapatan berkurang, citra kegiatan buruk	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengisi Acara/Pengisi Kegiatan Adat	Pengurangan pembayaran	RKF.006	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Negosiasi yang tidak transparan, kurangnya kontrak yang jelas	Internal	C	engisi acara/pengisi kegiatan adat dirugikan, citra kegiatan buruk	Semua orang yang terlibat

	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi										
	Kegiatan: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Perencanaan Anggaran	Penggelembungan anggaran	RKF.007	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kurangnya transparansi dalam penyusunan anggaran, kurangnya pengawasan	Internal	C	Kerugian keuangan, alokasi anggaran tidak efisien	Semua orang yang terlibat
			Pelaksanaan Pemeliharaan	Penggunaan suku cadang palsu	RKF.008	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kurangnya pengawasan terhadap kualitas suku cadang, kurangnya pengetahuan teknis	Internal	C	Kualitas pemeliharaan rendah, kendaraan cepat rusak	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kegiatan: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>	Tersedianya Aset Tetap lainnya	Pengadaan	Mark-up harga	RKF.009	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kolusi antara panitia dan vendor, kurangnya informasi harga pasar	Internal	C	Kerugian keuangan, harga aset lebih mahal dari harga pasar	Semua orang yang terlibat
			Penyimpanan dan Pengelolaan	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi	RKF.010	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan aset, lemahnya sistem pencatatan	Internal	C	Aset hilang atau rusak, kerugian keuangan	Semua orang yang terlibat
			Pemilihan Vendor	Kolusi dengan vendor	RKF.011	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Proses pemilihan vendor yang tidak transparan, kurangnya pengawasan	Internal	C	Harga aset tidak kompetitif, kualitas aset tidak sesuai	Semua orang yang terlibat

Palembang, Januari 2026
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Provinsi Sumatera Selatan			
Tahun Penilaian		: 2026			
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis OPD 1: Disbudpar					
1	Promosi tidak efektif	RKS.001.01	3	3	9
2	Pemasaran pariwisata tidak optimal	RKS.001.02	3	4	12
3	Pelatihan dan pengembangan SDM tidak efektif	RKS.001.03	4	3	12
4	Data warisan budaya tidak akurat	RKS.002.01	4	3	12
5	Kualitas SDM di bidang kebudayaan rendah	RKS.002.02	3	4	12
2 Risiko Strategis OPD 2: Disbudpar					
6	Anggaran tidak terserap secara optimal	RKS.003.01	3	4	12
7	Laporan keuangan tidak akurat atau tidak tepat waktu	RKS.003.02	3	4	12
II Risiko Fraud OPD 1 dan 2: Disbudpar					
1	Penggelapan dana kegiatan	RKF.001	4	4	16
2	Manipulasi data laporan	RKF.002	3	4	12
3	Penggelembungan anggaran	RKF.003	3	3	9
4	Penggelembungan harga	RKF.004	3	3	9
5	Pungutan liar	RKF.005	3	4	12
6	Pengurangan pembayaran	RKF.006	3	4	12
7	Penggelembungan anggaran	RKF.007	3	3	9
8	Penggunaan suku cadang palsu	RKF.008	3	4	12
9	Mark-up harga	RKF.009	3	4	12
10	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi	RKF.010	4	4	16
11	Kolusi dengan vendor	RKF.011	4	3	12

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan,



Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda		: Provinsi Sumatera Selatan					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
1	Pemasaran pariwisata tidak optimal	RKS.001.02	Memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan promosi pariwisata	Pihak terkait tidak memiliki komitmen yang kuat	Menjalin kerjasama dengan pihak terkait lebih luas lagi (agen perjalanan, maskapai penerbangan, dll.)	Kepala Dinas dan Kepala Bidang	Triwulan III 2026
2	Kualitas SDM di bidang kebudayaan rendah	RKS.002.02	Mengadakan Bimbingan Teknis serta sosialisasi mengenai pentingnya budaya khususnya Sumsel	Program sosialisasi dan edukasi tidak menarik atau tidak menjangkau target sasaran.	Mengadakan program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kebudayaan bagi untuk memprioritaskan generasi muda	Kepala Bidang	Triwulan III 2026
3	Anggaran tidak terserap secara optimal	RKS.003.01	Memastikan target kinerja dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia	Kurangnya evaluasi terhadap pencapaian target kinerja.	Menetapkan target kinerja yang tepat	Kepala Dinas	Triwulan I 2026
II Risiko Fraud Operasional Dinas Kebudayaan dan							
1	Penggelapan dana kegiatan	RKF.001	Melakukan pengawasan internal	Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengawasan	Memastikan seluruh transaksi keuangan tercatat dan diawasi dengan baik	Sekretaris Dinas	Triwulan IV 2026
2	Manipulasi data laporan	RKF.002	Memonitoring pengolahan data laporan	Kurangnya kesadaran dan integritas dalam pengolahan data	Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi	Sekretaris Dinas	Triwulan IV 2026
3	Penggelembungan anggaran	RKF.003	Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun anggaran	Evaluasi tidak dilakukan secara objektif atau tidak transparan	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran secara berkala	Sekretaris Dinas	Setiap semester 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGLATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Menjalin kerjasama dengan pihak terkait lebih luas lagi (agen perjalanan, maskapai penerbangan, dll.)	Melalui surat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pihak terkait (agen perjalanan, maskapai penerbangan, dll.)	Triwulan II 2026		
2	Mengadakan program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kebudayaan bagi untuk memprioritaskan generasi muda	Melalui surat/via Zoom Meet	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pihak terkait yang berkaitan dengan komunitas generasi muda	Triwulan II 2026		
3	Menetapkan target kinerja yang tepat	Melalui rapat koordinasi dan forum discussion	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan I 2026		
4	Memastikan seluruh transaksi keuangan tercatat dan diawasi dengan baik	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Anggaran secara berkala	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan IV 2026		
5	Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi	Bimbingan teknis dan pelatihan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan IV 2026		
6	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran secara berkala	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara berkala	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan IV 2026		

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan				
Tahun Penilaian		: 2026				
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Menjalin kerjasama dengan pihak terkait lebih luas lagi (agen perjalanan, maskapai penerbangan, dll.)	Negosiasi dan Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan II		
2	Mengadakan program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kebudayaan bagi untuk memprioritaskan generasi muda	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan II		
3	Menetapkan target kinerja yang tepat	Melakukan review terhadap proses penetapan target kinerja	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan I		
4	Memastikan seluruh transaksi keuangan tercatat dan diawasi dengan baik	Review Dokumentasi dan Observasi	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan IV		
5	Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi	Analisis data penggunaan sistem, survei	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan II		
6	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran secara berkala	Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan I		

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan



Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008